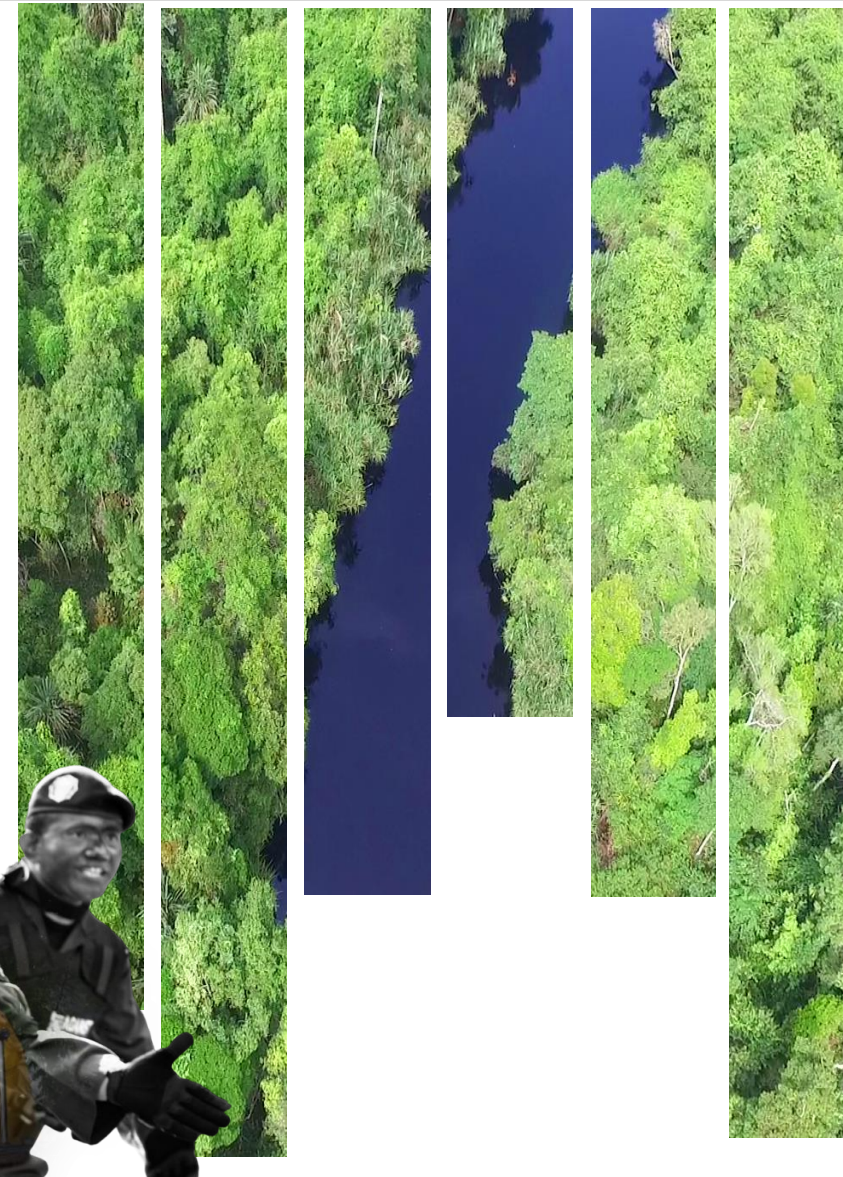




Konsolidasi Perlindungan & Pengamanan Hutan

Dr. Ir. SUSTYO IRIYONO, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001



Desember 2023

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SDA UNTUK MERAWAT KEUNGGULAN KOMPARATIF INDONESIA

SUMBER DAYA ALAM

ANCAMAN SUMBER DAYA ALAM



PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN (PP 23 Tahun 2021)

Pasal 249

Penyelenggara Perlindungan Hutan (sesuai kewenangannya) :

- 1. Pemerintah Pusat**
- 2. Pemerintah Daerah**
- 3. Badan usaha milik negara bidang Kehutanan**
- 4. Pemegang Hak**
- 5. Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan Perhutanan Sosial atau Perizinan Berusaha,**
- 6. Pemegang Perizinan Berusaha di luar Kawasan Hutan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar Kawasan Hutan**
- 7. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha.**

PERAN PERLINDUNGAN HUTAN/PENEGAKAN HUKUM

PEMEGANG OTORITAS TATA KELOLA & PENGELOLA KAWASAN HUTAN



DUKUNGAN PENGAMANAN HUTAN & PENEGAKAN HUKUM

**DUKUNGAN
CAPAIAN FOLU
NET SINK 2030**

**DUKUNGAN
PEMBANGUNAN
IBU KOTA
NUSANTARA**

**PENEGAKAN
HUKUM
KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

**DUKUNGAN
IMPLEMENTASI
KHDPK DAN
PERHUTANAN
SOSIAL**

**OPS. PENINDAKAN
PERUSAKAN
MANGROVE DAN
PERUSAKAN
LAHAN GAMBUT**

**OPS. PERBURUAN &
PEREDARAN
ILEGAL TSL DAN
KONFLIK
MANUSIA-SATWA**

**IDENTIFIKASI
KEGIATAN/USAHA
TERBANGUN DLM
KAWASAN HUTAN
TANPA IJIN**

KONDISI DAN PERMASALAHAN PENGAMANAN HUTAN

SISTEM PENGAMANAN HUTAN

Upaya pengamanan hutan masih bersifat **PARSIAL**

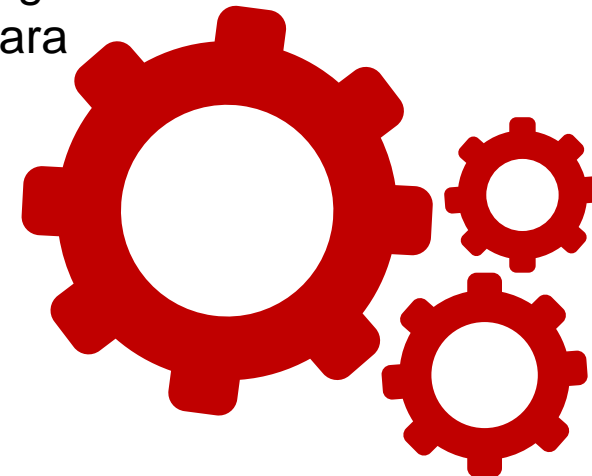


Penanganan belum berjalan terpadu dan berkesinambungan

Masing-masing instansi bergerak reaktif menangani permasalahan yang terjadi di wilayah kewenangannya

Kegiatan pengamanan hutan dilakukan masing-masing instansi, belum berada dalam satu garis komando dari pusat sampai ke tingkat tapak

Upaya pengamanan yang dilakukan belum sinergi dengan melibatkan para pihak terkait



TENAGA PENGAMANAN HUTAN

a. Jumlah Polhut

Di Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah sebanyak 5.759 orang

b. Luas kawasan hutan

Indonesia adalah seluas ±125.945.195 Ha

c. Ratio jumlah Polhut dengan luas kawasan adalah 1 : 21.869,28



Kualitas Polhut

Berdasarkan Pemetaan Kompetensi Pusrenbang Tahun 2020 dengan aplikasi SPEKTRA, hasil penilaian pemenuhan kompetensi Pusrenbang terhadap jabatan fungsional Polhut adalah hanya 5,67 % kompetensi yang dapat dilampaui, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas polhut masih jauh dari memadai. Masih terdapat 94,23% kompetensi yang belum terpenuhi.

Organisasi Polhut

Polhut berkedudukan pada organisasi Kementarian, Pemda, Perum Perhutani

Belum ada satu komando

**Satuan Pengamanan Hutan (SPH)
belum terbentuk sesuai standar**

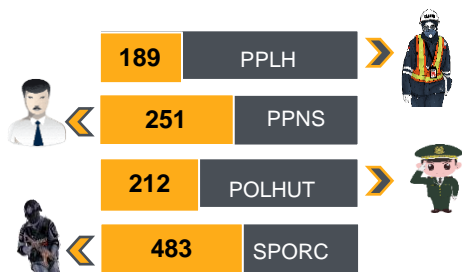
SARPRAS PENGAMANAN HUTAN

a. SARPRAS PAMHUT **BELUM MEMADAI DAN MEMENUHI STANDAR**

b. PENGGUNAAN TEKNOLOGI **BELUM MERATA**



JUMLAH APARAT PENEGAKAN HUKUM LHK



BALAI GAKKUM LHK SUMATRA

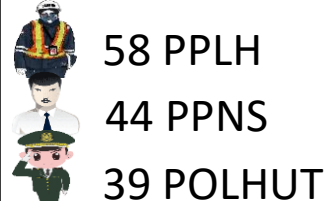
BPPHLHK SUMATERA



BPPHLHK JABALNUSRA



KANTOR PUSAT



UNIT PELAKSANA TEKNIS & SDM DITJEN GAKKUM LHK

BPPHLHK KALIMANTAN



BALAI GAKKUM LHK KALIMANTAN



BPPHLHK SULAWESI



BALAI GAKKUM LHK SULAWESI



BPPHLHK MAPUA



BALAI GAKKUM LHK MALUKU DAN PAPUA



KONDISI YANG DIINGINKAN

1. Penguasaan teritori berbasis data dan informasi akurat terkait kondisi riil kawasan hutan, hutan, dan hasil hutan termasuk TSL sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan intervensi pengamanan hutan;

2. Pengamanan hutan dilakukan sinergis dan terpadu dari tingkat tapak sampai ke tingkat nasional didukung jejaring kerja dengan para pihak terkait;

3. Peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan yang mampu menjawab tantangan dan dinamika ancaman dan gangguan keamanan hutan;

4. Pemenuhan standar dan kapasitas sarana prasarana pengamanan hutan;

5. Penerapan instrumen penegakan hukum (administrasi, pidana, perdata) dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan

STRATEGI PENGAMANAN LHK

PENGUATAN PENCEGAHAN

Penguasaan Teritori berbasis Data dan Informasi Akurat serta Penguatan Deteksi Dini

- Identifikasi Kerawanan (Ancaman dan Gangguan), termasuk dukungan basis data penggunaan kawasan hutan yang telah terbangun tanpa ijin
- Optimalisasi intelijen rutin
- Pemanfaatan Desk Analysis, konek
- Pemetaan permasalahan (Puldasi/Operasi Intelijen)
- Penguatan Patroli, termasuk Patroli Siber
- Pembangunan cek poin di jalur rawan peredaran illegal hasil hutan & TSL
- Sosialisasi & Kampanye, termasuk publikasi kinerja

PENGUATAN PENGAMANAN

Sinergis dan terpadu dari tingkat tapak sampai ke tingkat nasional didukung jejaring kerja dengan para pihak terkait

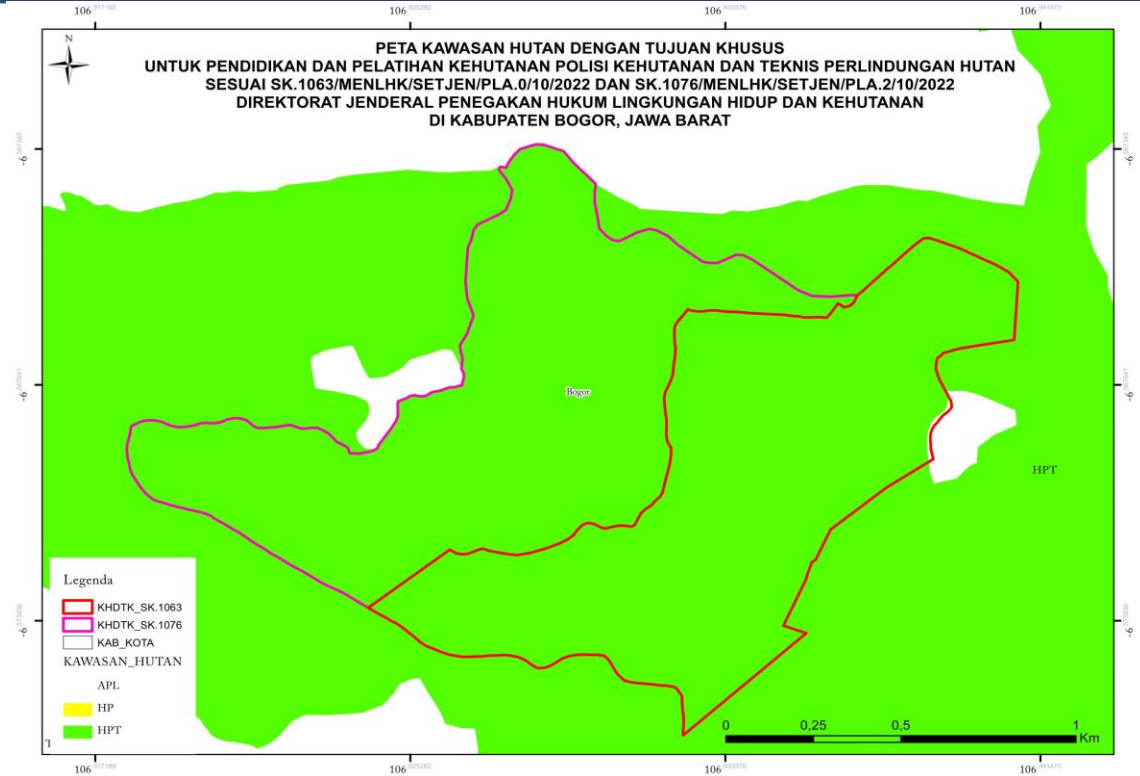
- Penguatan koordinasi dan kerjasama
- Kolaborasi dengan para pihak
- Mendorong peran pemangku/pengelola kawasan
- Peningkatan operasi pengamanan
- Penindakan terhadap pemodal/Beneficial Owners

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LHK

PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN SARPRAS

Mampu menjawab tantangan dan dinamika ancaman dan gangguan keamanan hutan

- Penambahan Jumlah Polhut
- Penguatan Polhut di Pemda :
 - ✓ Mendorong Pemda utk rekrutmen & pengangkatan Polhut (Fungsional)
 - ✓ Fasilitas Diklat
- Peningkatan kualitas SPORC dan Polhut (Diklat Teknis, Manajerial, Penguasaan Teknologi)
- Optimalisasi fungsi Polhut
- Pembentukan Satuan Pengamanan Hutan yang terstandar (Pemegang Perijinan dan Persetujuan Pemerintah)
- Pemenuhan standar dan kapasitas sarpras
- Pemanfaatan teknologi (pengembangan intelligence center di UPT)



Pengembangan dan Pemanfaatan KHDTK Pusat Pelatihan Polhut dan Teknis Perlindungan di Kab. Bogor seluas 200 Ha → Peningkatan Kapasitas Polhut

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan Th. 2023



DIKLAT INTELIJEN 42 ORANG



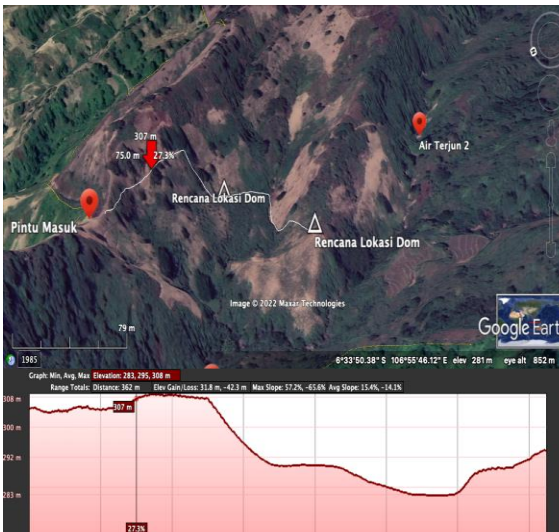
PENGHARGAAN WANALESTARI
10 ORANG TELADAN



PENDIDIKAN DAN
PEMBENTUKAN POLHUT
487 ORANG



PENGADAAN AMUNISI & SERAGAM



PEMBANGUNAN PUSAT
LATIHAN POLHUT



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



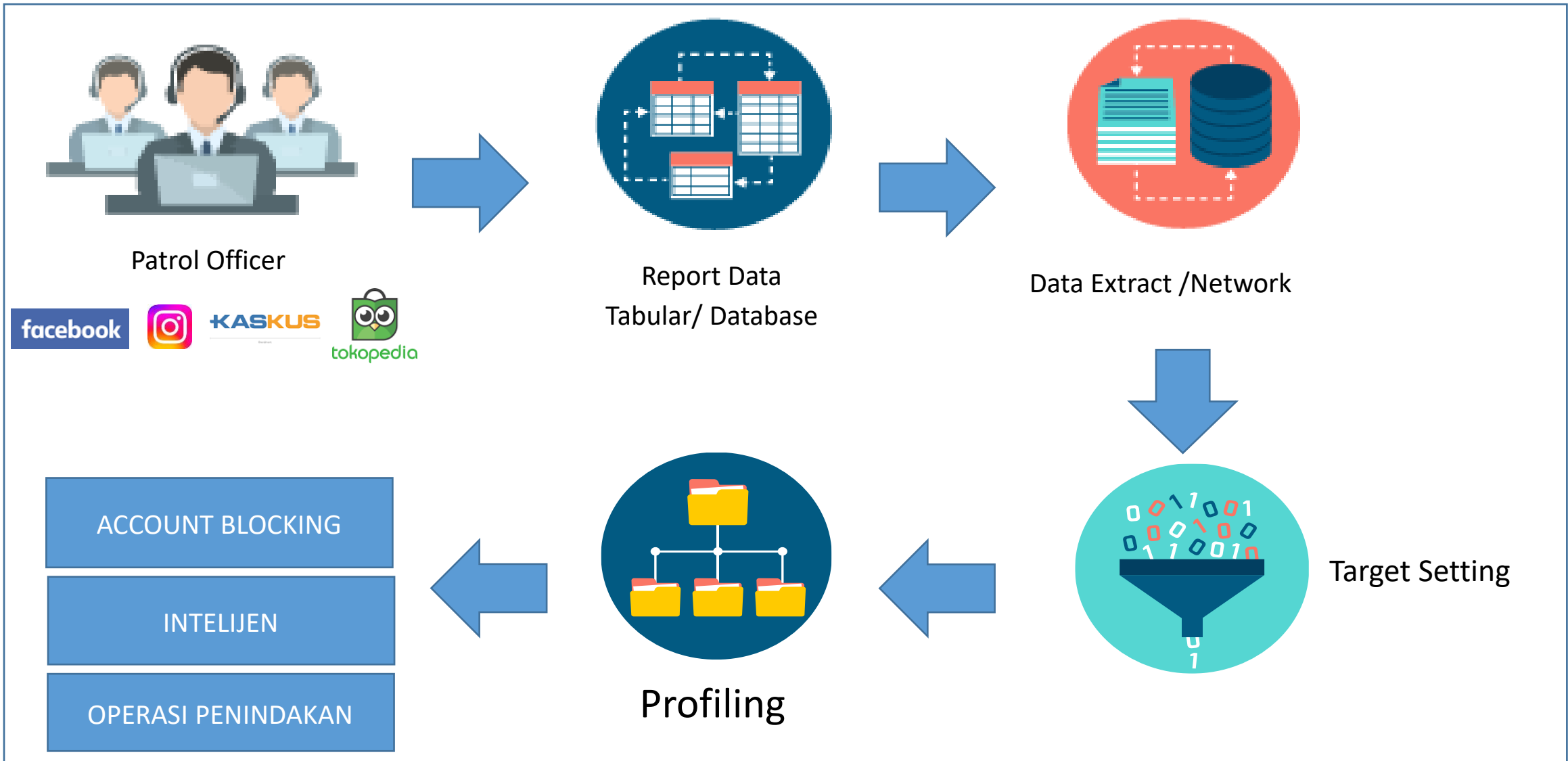
GAKKUMKLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**

Patroli Siber Perdagangan Ilegal TSL (Online)



Hasil Patroli Siber Tahun 2023

262

Akun Perdagangan

393

Konten Perdagangan

49

Jenis Satwa

584

Ekor Hidup

72

Bagian Tubuh Satwa

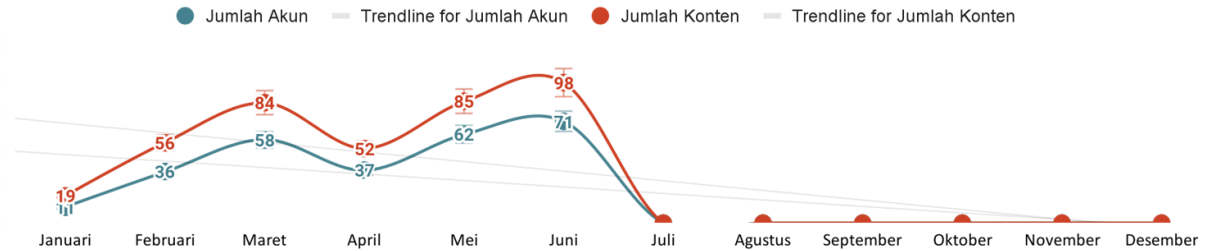
259 Akun Aktif

3 Akun Dihapus

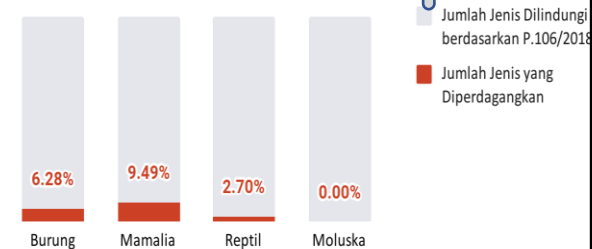
167 Konten Aktif

226 Konten Dihapus

Status Akun



Tren Perdagangan PISL



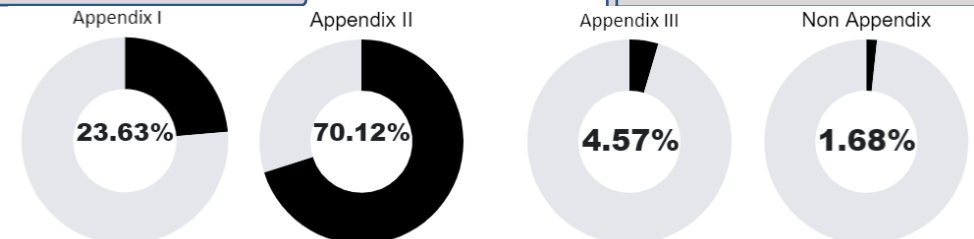
Bukalapak
0-0.38%

Shopee
0-0.38%

Facebook
0-98.85%

Tik Tok
0-0.38%

Presentase Jenis Satwa



Jenis E-Commerce

Jumlah Akun

Nama Akun (Sum)

1.00 33.00

Jumlah Jenis TSL

Jenis TSL (Sum)

Jumlah Iklan

Link Iklan (Sum)

Lokasi Persebaran PISL

Status Cites



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST
X-CRIME

Puldasi & Operasi Pengamanan

JUMLAH OPERASI TH 2015 - 2023

477

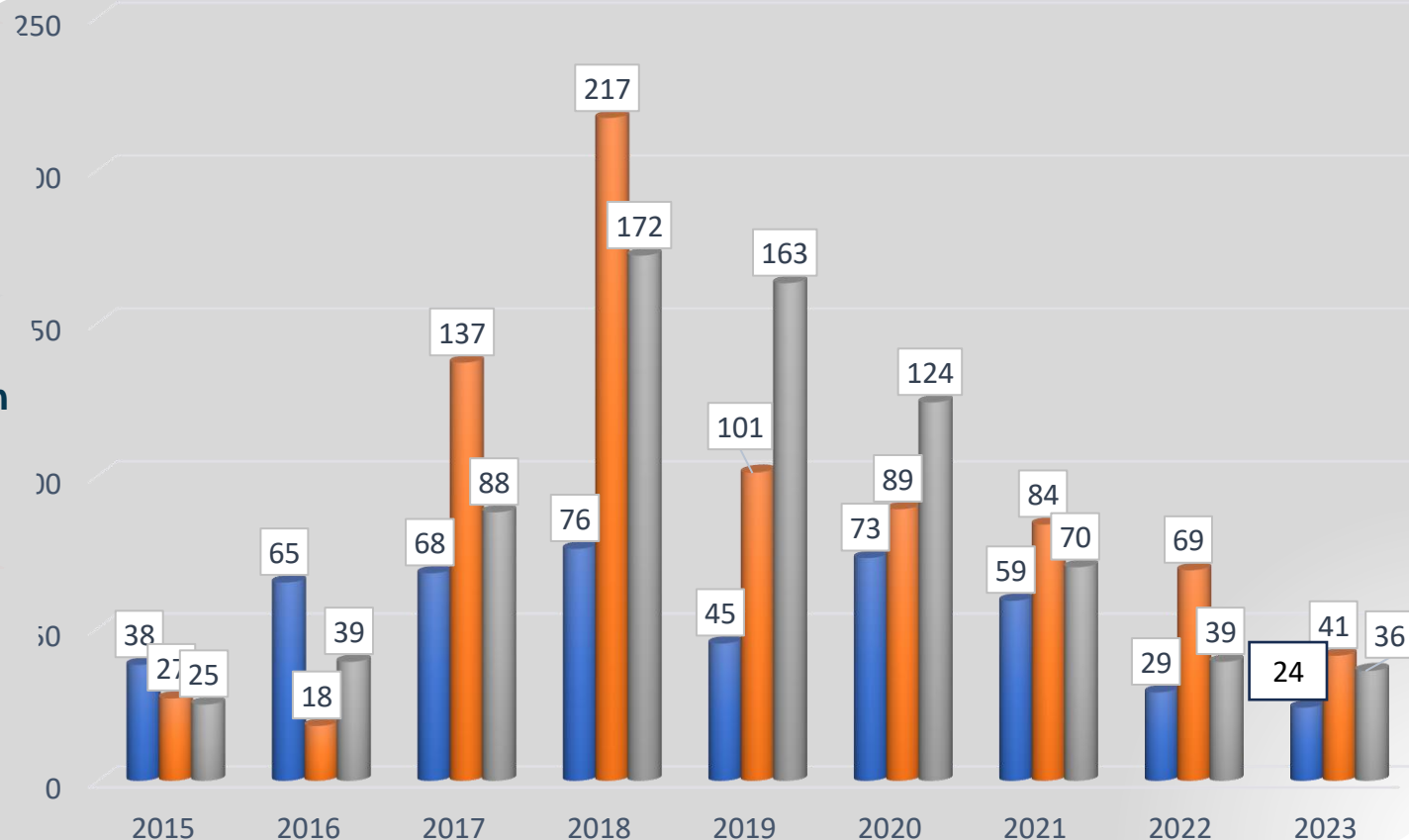
TSL

783

Perambahan

756

Illog



Penguatan Koordinasi dan Kerjasama

NATIONAL

- Kepolisian RI
- Kejaksaan
- Mahkamah Agung
- KPK
- PPATK
- Bea dan Cukai
- Kemenkumham
- Kem Kominfo
- Karantina
- Imigrasi
- National E-Commerce
- LSM

INTERNATIONAL

- INTERPOL
- UNODC
- CITES
- GEF-UNDP (Combating Illegal Wildlife Trade)
- MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) dgn Belanda





TERIMA KASIH

**DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LHK**

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok 4 Lt.4
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

Sekretariat Pengaduan
62-811-1043-994

www.gakkum.menlhk.go.id
021-57902925